

DEINDUSTRIALISASI SEBUAH ANCAMAN KEGAGALAN TRIPLE TRACK STRATEGY PEMBANGUNAN DI INDONESIA

P. Eko Prasetyo

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
email:prasetyo.dr.eko@gmail.com

ABSTRACT

SBY government work effort through the triple-track strategy namely pro-growth, pro jobs and pro-poor developments will be doomed to fail because of a deindustrialization in Indonesia. The phenomenon of deindustrialization is characterized by the continued decline of industrial contribution mainly manufacture industrial sektor to the value added, employment, exports and contribution to GDP growth, would obviously be a serious threat to the government in its efforts to achieve economic growth to reduce unemployment and poverty. Industrial sektor at this time was no longer regarded as a leading sektor in the national and regional development, so that if eagerly handled will have a negative impact more and could threaten the stability of the economic development of Indonesia.

Keywords: *deindustrialization and the threat of triple track strategy*

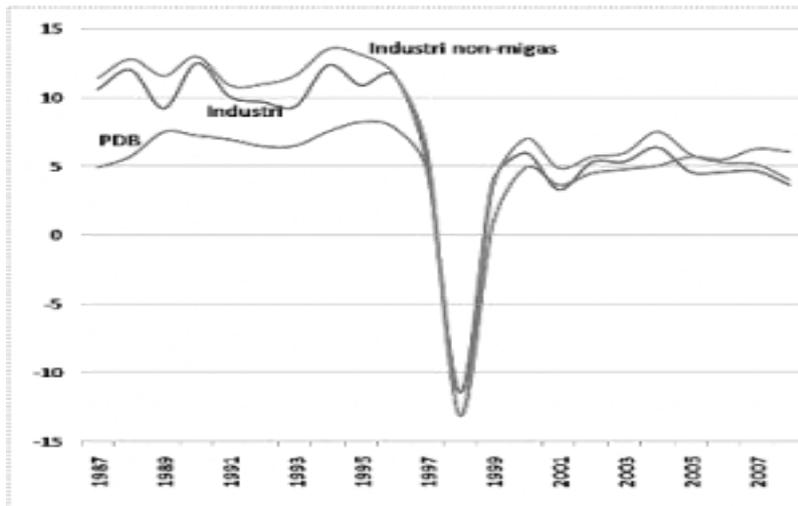
PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan Industri di suatu negara termasuk di Indonesia adalah untuk mempercepat pencapaian dalam mensejahterahkan rakyat. Sejak tahun 1969 hingga tahun 1999, pembangunan industri di Indonesia telah menjadi leading sektor dan memiliki peran yang sangat strategis, karena mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur perekonomian nasional. Pada saat itu, pembangunan sektor industri telah mendapatkan perhatian yang sangat besar karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah, serta kesempatan kerja dan berusaha yang baik bagi masyarakat. Selain itu, juga mampu meningkatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor dan meningkatkan pembangunan daerah melalui mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah, serta memperkuat stabilitas nasional.

Pada masa-masa tersebut, proses industrialisasi merupakan andalan dalam pembangunan Indonesia, karena mampu menggerakkan roda perekonomian nasional menjadi lebih baik dan cepat. Sumbangan pembangunan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PDB secara cepat mampu mengeser sektor pertanian. Sumbangan sektor industri pada saat itu menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, bahkan

mampu melampaui sektor pertanian. Sementara itu, sektor pertanian justru menunjukkan kecenderungan yang menurun, sehingga sektor industri sering disebut sebagai leading sektor dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, tidaklah salah jika sektor industri telah dianggap sebagai podasi yang kuat dalam menompang strategi pembangunan *triple track strategy* yakni; mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Namun demikian, proses industrialisasi di Indonesia, sejak tahun 2000 hingga saat ini (tahun 2011) telah mengalami titik balik bagi perekonomian nasional dan dapat mengancam ketidak berhasilan *triple track strategy* pembangunan di Indonesia. Pertumbuhan sektor industri secara umum memang masih mengalami peningkatan, tetapi ada kecenderungan peningkatan yang terus menurun, terutama pada sektor industri manufaktur. Pertumbuhan sektor industri manufaktur justru menurun lebih dratis. Dampak dari masalah ini, sumbangan sektor industri terutama terhadap penyerapan tenaga kerja, nilai tambah, penambahan devisa dan peningkatan PDB juga terus menurun. Artinya sektor industri pada saat ini sudah tidak dapat lagi disebut sebagai leading sektor dan penompang utama stabilitas ekonomi nasional.



Gambar-1: Fenomena pertumbuhan industri dan PDB di Indonesia

Sejak krisis ekonomi 1998, terutama periode tahun 2005-2010, pertumbuhan sektor industri lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Selama sembilan tahun terakhir 2000-2008, pertumbuhan sektor industri manufaktur memang sedikit masih lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB, terutama pada periode 2000-2004 (lihat Gambar-1). Padahal, periode sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan sektor industri relatif masih jauh dari pertumbuhan PDB. Pada periode sebelum krisis, pertumbuhan rata-rata sektor industri masih tetap di atas 10%. Namun, pada masa setelah krisis, yakni pada periode kebangkitan tahun 2000-2008 tersebut, pertumbuhan rata-rata sektor industri manufaktur hanya sebesar 5,7% per tahun, dan pertumbuhan rata-rata PDB sebesar 5,2%.

Selanjutnya, pada tahun 2009 pertumbuhan sektor industri justru jauh lebih rendah daripada pertumbuhan PDB, di mana pertumbuhan sektor industri hanya sebesar 1,3% dan pertumbuhan PDB sebesar 4,2%. Berdasarkan semua fenomena tersebut di atas, dapat diartikan bahwa kontribusi pembangunan sektor industri terutama sektor industri manufaktur sudah tidak signifikan lagi dan sudah tidak dapat dianggap sebagai leading sektor dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa telah terjadi deindustrialisasi di Indonesia.

Berdasarkan garis besar fenomena tersebut di atas, artikel ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam tentang berbagai masalah deindustrialisasi, termasuk faktor penyebab deindustrialisasi dan

dampak deindustrialisasi terhadap perekonomian. Beberapa pokok masalah tentang konsep dasar deindustrialisasi, mengapa terjadi deindustrialisasi di Indonesia, faktor apa yang menjadi penyebab utama terjadinya deindustrialisasi serta mengapa dampak deindustrialisasi menjadi acuan serius terhadap *triple track strategy* pembangunan perekonomian nasional Indonesia akan dibahas secara lebih mendalam dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Deindustrialisasi dan permasalahannya

Pembangunan sektor industri (industrialisasi) di Indonesia merupakan salah satu upaya strategi jangka panjang untuk menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional demi kesejahteraan rakyat. Karena itu, pembangunan sektor industri harus terus didorong maju, sehingga tetap mampu sebagai leading sektor dalam pembangunan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertumbuhan industri manufaktur pernah sebagai penopang utama dalam perkembangan pembangunan industrialisasi di Indonesia. Pada saat itu, secara kuantitas dan kualitas, pertumbuhan dan perkembangan sektor industri manufaktur di daerah maupun nasional, mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur perekonomian nasional dan telah mampu meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi Indonesia.

Jika secara teoritis, konsep dasar periode pembangunan dalam jangka panjang adalah konsep waktu selama minimal 35 tahun, maka selama kurun waktu tersebut, mestinya keberhasilan pembangunan sektor industri akan terus berlangsung dan baru akan menurun ketika sudah melewati kurun waktu tersebut. Namun, dalam kenyataannya konsep pembangunan sektor industri di Indonesia sudah menurun lebih cepat sebelum masa kurun waktu tersebut tercapai. Jelasnya, pembangunan sektor industri dimulai sejak Repelita pertama tahun 1969 dan semakin diperkuat ketika Repelita kedua dan seterusnya. Namun sejak krisis ekonomi Indonesia tahun 1997, tepatnya ketika tahun 2000, pertumbuhan sektor industri justru cenderung sudah semakin terus menurun.

Pada tabel-1, menunjukkan bahwa sumbangan dari sektor industri terus menurun, inilah ciri temudah untuk melihat terjadinya deindustrialisasi (Prasetyo, 2010). Menurunnya sumbangan sektor industri inilah yang selanjutnya dalam artikel ini dapat disebut sebagai proses terjadinya deindustrialisasi (*deindustrialization*) di Indonesia. Artinya, konsep dasar deindustrialisasi yang dimaksud dalam artikel ini adalah adanya kecenderungan yang semakin menurunnya nilai tambah riil dalam arti luas dari sektor industri terutama terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi, sekalipun pertum-

buhan jumlah industri tetap masih meningkat. Dengan kata lain, fenomena ini menunjukkan bahwa sektor industri di Indonesia sudah tidak dapat lagi disebut sebagai lokomotif atau leading sektor dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah di Indonesia.

Perlu disadari bersama bahwa industri manufaktur di Indonesia selama ini merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Namun demikian, lebih tepatnya sejak tahun 2003 hingga sekarang, keterpurukan pada sektor industri manufaktur ini mengakibatkan pekerja pada sektor formal juga semakin terdesak. Pada beberapa tahun terakhir, industri manufaktur ini mengalami penurunan yang cukup besar. Misalkan pada tahun 2005 tumbuh sebesar 18,8 persen, namun pada tahun 2008 turun hanya menjadi 17 persen saja. Artinya, kondisi penurunan pertumbuhan sektor industri manufaktur ini yang menyebabkan daya serap tenaga sektor formal juga ikut merosot, dan ini menjadi kenyataan pahit bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran (*too poor to be unemployed*), yang selanjutnya mereka terpaksa harus beralih ke sektor informal, sehingga pada awal tahun 2011 ini sektor informal sudah mampu menyerap tenaga kerja secara keseluruhan hingga 69,5 persen lebih. Lebih parah lagi, berdasarkan fenomena data pada tabel-2 dan tabel-3 serta gambar-2 di bawah, menunjukkan penurunan pertumbuhan sektor

Tabel-1: Ciri Deindustrialisasi di Indonesia

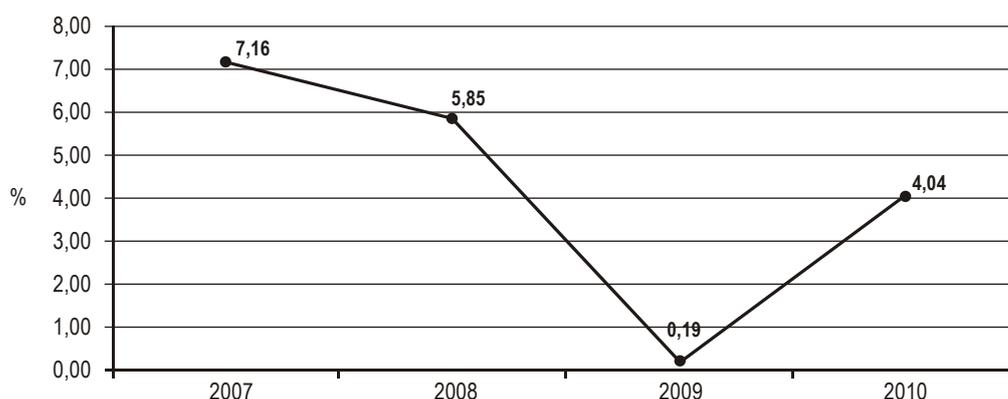
Kondisi	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Unit Industri	29.468	27.998	25.694	25.077	-
Jumlah tenaga kerja	4.755.703	4.624.937	4.457.932	4.405.643	-
Pertumbuhan Industri	4,6	4,7	3,7	2,2	4,5
Pertumbuhan PDB	5,5	6,3	6,0	4,6	6,1

Sumber: BPS, 2010

Tabel 2. Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan Besar dan Sedang (persen) Tahun 2007 - 2010
2000 = 100

Tahun	(q-to-q)				(y-on-y)				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2007	-1,65	4,43	5,04	-3,18	7,16	6,91	4,01	4,46	5,57
2008	-0,34	1,92	3,31	-3,26	5,85	3,3	1,6	1,51	3,01
2009	-1,65	2,38	2,74	0,50	0,19	0,64	0,09	3,98	1,22
2010	-1,59				4,04				

Sumber: BPS, 2010



Gambar-2. Fenomena Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang yang Menurun

Tabel-3: Kondisi Persentase Pertumbuhan Industri, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan, Indeks Gini Rasio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia

Tahun	Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Gini Rasio	IPM
2005	7,51	5,69	11,90	15,97	0,343	69,55
2006	5,86	5,50	10,93	17,75	0,357	70,10
2007	5,57	6,35	10,01	16,58	0,376	70,59
2008	3,01	6,01	9,45	15,42	0,368	71,17
2009	1,34	4,55	9,26	14,15	0,357	71,76
2010	4,41	6,10	8,59	13,33	0,338	72,27

Sumber: BPS, berbagai terbitan

industri secara total justru lebih rendah dan lebih parah. Berdasarkan data tabel-2 dan gambar-2, pada tahun 2007 pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan menengah secara total masih sebesar 5,57 persen, tapi pada tahun 2009 tinggal hanya tumbuh 1,22 persen. Sedangkan, pertumbuhan secara triwulan pertama dari tahun ke tahun pada gambar-2 dari tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan produksi industri sebesar 7,16 persen, namun pada akhir triwulan pertama di tahun 2009 hanya tinggal 0,19 persen saja. artinya fenomena ini menunjukkan bawah masalah deindustrialisasi sektor industri pengolahan besar dan menengah semakin nyata.

Pada masa deindustrialisasi periode tahun 2003-2009, khususnya periode tahun 2007-2009 ada beberapa sektor industri yang mengalami gejala deindustrialisasi dan nyaris ambruk yakni; sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, sektor industri barang kayu dan hasil hutan, serta sektor industri logam dasar besi dan baja. Untuk industri yang di tulis terakhir (industri logam dasar besi dan baja), dapat dikatakan bagaikan buah si mala kama

atau dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan dan kinerja sektor industri besi dan baja tersebut tidak sekokoh dan kekuat namanya (Prasetyo, 2010). Padahal, industri besi dan baja ini merupakan sektor industri penunjang utama dan pertama dalam pembangunan infrastruktur di suatu negara termasuk di Indonesia. Dengan demikian, maklum jika ada multiplier efek dari ketidakberdayaan sektor industri besi dan baja ini terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor industri ini mengalami deindustrialisasi.

Pada saat ini dan mendatang, berbagai upaya penguatan untuk sektor industri khususnya pada industri manufaktur harus terus diupayakan segera, sehingga dapat kembali meningkatkan daya serap tenaga kerja (pengangguran) di sektor formal, yang pada tahap selanjutnya kemampuan ini akan dapat diyakini sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir setelah krismon di Indonesia ini, upaya pengentasan kemiskinan terkesan jalan ditempat saja dan masih banyak jumlah penduduk miskin yang di bawah garis kemiskinan yakni pada tahun 2009 masih ada sekitar 32,5 juta jiwa atau masih sebesar 14,15 persen dari jumlah

penduduk. Karena itu, penciptaan lapangan kerja di sektor industri manufaktur ini adalah salah satu upaya terbaik yang harus segera dilakukan agar pengentasan kemiskinan tidak lagi berjalan ditempat. Berbagai upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kebijakan pemberdayaan dalam arti luas (*empowering, enabling dan protekting*) agar industri manufaktur di Indonesia dapat bangkit kembali sebagai leading sektor dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Pad tabel-3, dampak lain dari menurunnya sektor industri manufaktur tersebut dan sektor industri total ternyata turut memperbesar ketimpangan pendapatan menjadi semakin memburuk khususnya selama periode tahun 2005-2009. Hal ini dapat dilihat dari koefisien indek gini rasio yang secara rata-rata tetap masih besar karena masih di atas 0,30 dan ada kecenderungan yang meningkat pada beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2005-2009. Fenomena ini dapat dimaknai, bahwa pada masa terjadinya deindustrialisasi secara tidak langsung dapat mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan juga makin meningkat. Hal ini juga dapat dilihat kembali, ketika pada tahun 2009-2010 pertumbuhan industri meningkat dari 1,34 persen menjadi 4,41 persen, berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 4,55 persen menjadi 6,10 persen. Penurunan pertumbuhan sektor industri dan penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada semakin menurunnya jumlah pengangguran serta kemiskinan, dan dampak selanjutnya ternyata juga ikut menurunnya tingkat indek ketimpangan pendapatan yang sedikit makin baik yakin dari 0,357 menjadi 0,338

Hasil penelitian sebelumnya (Dewi, 2010) berdasarkan pendekatan Kaldorian, menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap pada periode analisis 1983-2008. Pertumbuhan sektor manufaktur memicu pertumbuhan sektor selain manufaktur, sehingga pada akhirnya memicu pertumbuhan PDB akan tumbuh lebih pesat. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa, proses deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002, cenderung menuju ke arah negatif. Artinya, penurunan kinerja sektor manufaktur justru semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi. Deindustrialisasi negatif ini salah satunya ditandai dengan

rendahnya *trade balance*. Lebih lanjut dijelaskan bahwa deindustrialisasi yang terjadi bukan dampak alamiah dari proses pembangunan yang sangat maju, melainkan lebih disebabkan karena oleh goncangan (*shock*) terhadap perekonomian Indonesia. Dijelaskan ada beberapa faktor penyebab guncangan tersebut yaitu, turunnya investasi modal tetap, menurunnya kinerja perdagangan luar negeri, turunnya nilai impor bahan baku, dan membanjirnya produk impor dari China serta impor barang-barang konsumsi di pasar domestik.

Hasil kajian (Basri,2009), menunjukkan ada lima faktor penyebab terjadinya deindustrialisasi di Indonesia, yaitu; (a) daya tarik sektor manufaktur sudah tidak menarik lagi, (b) lemahnya struktur industri, sehingga Indonesia semakin tersingkir dari jaringan produksi manufaktur regional dan global (c) kecederungan menurunnya daya saing industri, (d) jumlah perusahaan industri manufaktur yang menurun, (e) penurunan penuaian listrik ke sektor industri. Basri juga menegaskan bahwa gejala deindustrialisasi di Indonesia menunjukkan ke arah negatif, di mana dalam lima tahun terakhir (2005-2009) sumbangan sektor manufaktur selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB, dan lebih parahnya penurunan kinerja sektor industri tersebut memperburuk pertumbuhan ekonomi.

Deindustrialisasi dan gagalnya triple track strategy pembangunan

Sebagai motor penggerak utama pembangunan, maka keberadaan sektor industri menjadi sangat penting, khususnya perkembangan industri manufaktur memang sangat diandalkan. Namun demikian, fenomena penurunan pertumbuhan sektor industri yang terjadi pada saat ini yang dapat menimbulkan efek domino inilah yang justru sangat meresahkan, dan harus segera diselesaikan. Penurunan pertumbuhan sektor industri, bukan saja hanya menyebabkan PDB atau pertumbuhan ekonomi menurun, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya gelombang pengangguran dan kemiskinan baru yang terus membesar baik secara nasional maupun daerah. Karena fenomena problem pengangguran dan kemiskinan yang ada saat ini saja masih belum mampu diatasi dengan baik dan terkesan hanya jalan di tempat tadi.

Dengan kata lain, jika sektor industri gagal tumbuh (pertumbuhan terus menurun), maka strategi pembangunan *triple track strategy* pemerintahan SBY yakni; mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah pengangguran dan kemiskinan terancam gagal. Efek lebih lanjut dari kegagalan ini juga dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan akan makin besar sekalipun indeks pembangunan manusia (IPM) masih terus meningkat. Jika kita sadari, efek domino lain dari masalah ini yang justru harus diwaspadai adalah di bidang sosial dan kehidupan kemasyarakatan. Munculnya kejahatan dan kriminalitas serta kaum gepeng, akan terus meningkat. Jika demikian, artinya tujuan pemerintah membangun untuk mensejahterahkan rakyat sudah dapat dinyatakan gagal. Karena itu, masalah ini harus segera dapat diatasi agar strategi pembangunan *triple track strategy* tidak terancam gagal.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah penulis lakukan selama beberapa tahun terakhir ini, dapat ditarik kesimpulan serta saran dan rekomendasi bahwa; perlu segera dibangun dan diperbaiki infrastruktur dalam arti luas, terutama infrastruktur yang mendorong sektor industri dan perdagangan baik domestik maupun luar negeri, serta peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia) melalui proses pendidikan yang berkualitas dan trampil yang mampu sebagai penggerak utama roda pembangunan. Peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja menjadi sangat mutlak diperlukan, terutama ketrampilan tenaga kerja yang ada keterkaitan dengan industri (*link and match*). Untuk dapat tercapainya masalah ini harus ada kerjasama baik dan serius minimal antara tiga komponen ABG (akademisi, *bussines* atau industri dan *government* atau pemerintah).

Argumentasinya adalah, karena selama ini masih lemahnya dukungan dan keterkaitan dari ketiga komponen institusi itu secara sinergi. Misalkan masih lemahnya sumbangan lembaga riset atau akademisi dan kesungguhan pemerintah dalam membantu mengatasi masalah riil yang sedang dihadapi oleh sektor industri. Padahal, sebagian besar kondisi kinerja industri yang dilihat dari tingkat produktivitas dan daya saing industri di Indonesia masih rendah. Kebijakan pemerintah sendiri juga sering tidak sinergi antara kebijakan ditingkat makro, meso dan mikro. Sementara itu, transfer ilmu dan

teknologi, penetrasi pasar ekspor dan pengembangan inovasi serta variasi produk yang kompetitif dalam proses produksi yang diberikan oleh kalangan riset akademisi juga masih lemah. Dampak selanjutnya wajar jika tingkat produktivitas industri tetap rendah dan pada akhirnya daya saing industri juga tetap rendah.

Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang bersifat komprehensif dan tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan *triple track strategy* tersebut saja, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing global dari sektor industri dan bangsa ini secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang sinergi antara kebijakan di tingkat makro, meso dan mikro baik untuk kebijakan fiskal maupun moneter. Artinya kebijakan tersebut tidak boleh saling bertentangan, sehingga menimbulkan *crowding out* dan jalan ditempat. Salah satu kebijakan yang harus sinergi tersebut adalah kebijakan dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan kondusif serta kreatif, sehingga mampu meningkatkan produktivitas industri dan meningkatnya ekspor produk dari sektor industri melalui perdagangan, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan daya saing industri dan daya saing bangsa Indonesia sendiri di era globalisasi ini secara berkelanjutan. Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam bidang investasi baik melalui kebijakan fiskal dan moneter akhir-akhir ini sering menimbulkan masalah *crowding out*. Artinya kebijakan tersebut tidak mampu mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau efeknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah nol, bahkan ada yang bersifat *crowding out* sempurna atau berdampak pada menurunnya investasi swasta yang lebih besar daripada kebijakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui *triple track strategy* tersebut memang bagus dan telah banyak dilakukan. Namun demikian, dampaknya masih tetap nol. Karena kebijakan tersebut hanya berputar disektor keuangan saja dan belum menyentuh ke sektor riil secara nyata. Misalkan, kebijakan kenaikan pengeluaran pemerintah telah banyak dilakukan, namun kebijakan tersebut tidak memiliki efek positif bagi peningkatan pendapatan dan hanya mempengaruhi tingkat suku bunga saja. Karena itu setiap penambahan pengeluaran pemerintah selanjutnya justru

lebih berdampak pada penurunan sektor investasi swasta. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah hanya dapat menyakinkan masyarakat akan uang kas saja, sehingga hanya dapat menaikan keinginan masyarakat akan uang kas serta menurunnya *marginal efficiency of capital* (MEC), sehingga justru menghambat investasi masyarakat.

Dampak selanjutnya, ketika sektor investasi masyarakat turun, maka sudah jelas bahwa sektor industri kekurangan energi positifnya untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Artinya jelas bahwa sektor industri akan mengalami pertumbuhan menurun karena fenomena tersebut. Ini baru hanya sekedar salah satu contoh saja dari kebijakan pengeluaran pemerintah yang mestinya berdampak positif karena pemerintah sering menaikan gaji pegawai ditingkat makro mestinya untuk tujuannya baik untuk menaikan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan ini sering tidak sejalan di tingkat mikro, sehingga sering berdampak sebaliknya dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan peningkatan pengeluaran ini sejalanpun di tingkat mikro, misalkan perusahaan dipaksa untuk menaikan tingkat upahnya, maka yang terjadi justru pengangguran akan meningkat karena perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya (PHK). Artinya pengangguran yang diharapkan turun justru malah meningkat, yang berarti jika pengangguran meningkat maka identik dengan tingkat kemiskinan juga meningkat. Namun demikian, pemerintah sering tidak menyadari akan masalah ini. Berdasarkan fenomena ini, maka strategi kebijakan pemerintah melalui *triple track strategy* tersebut dapat dinyatakan gagal.

Sebagai contoh dari masalah tersebut ada tiga sektor industri yang dapat dinyatakan telah mengalami deindustrialisasi. Ketiga sektor industri yang mengalami deindustrialisasi dan dapat dinyatakan nyaris ambruk tersebut adalah sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, sektor industri barang kayu dan hasil hutan, serta sektor industri logam dasar besi dan baja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ketiga sektor industri tersebut sempat mengalami pertumbuhan negatif pada 2006-2010. Sektor industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki mulai mengalami pertumbuhan negatif pada 2007 dengan pertumbuhan minus 3,68 persen, dan pada 2008 minus 3,64 persen.

Sementara itu, sektor industri barang kayu dan hasil hutan sudah mengalami pertumbuhan negatif sejak 2006 dengan persentase pertumbuhan minus 0,66 persen dan minus 1,74 persen pada 2007. Meskipun industri ini sempat tumbuh positif sebesar 3,45 persen pada 2008, sektor industri barang kayu dan hasil hutan ini kembali terpuruk pada 2009 dengan pertumbuhan minus 1,38 persen dan minus 3,47 pada 2010. Demikian halnya dengan sektor industri logam dasar besi dan baja yang sempat anjlok pada 2008 dengan pertumbuhan minus 2,05 persen dan minus 4,26 persen pada 2009. Walaupun pada tahun 2010 pertumbuhannya kembali positif ke angka 2,38 persen.

Jika dianalisis lebih lanjut dari fenomena deindustrialisasi di ketiga sektor industri tersebut, menunjukkan semakin kuatnya kegagalan dari *triple track strategy* yang dimaksud. Kita harus menyadari bahwa dua sektor industri pertama yakni sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, serta sektor industri barang kayu dan hasil hutan, adalah dua sektor industri yang cenderung padat tenaga kerja, maknanya adalah jika kedua sektor industri tersebut mengalami pertumbuhan menurun, maka jelas nilai tambah sektor industri tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja juga menurun. Dengan kata lain, kemampuan terhadap penyerapan tenaga kerja baru adalah nol bahkan bisa jadi menambah pengangguran jika kedua sektor industri tersebut melakukan PHK.

Sementara itu, dampak dari penurunan sektor industri logam dasar besi dan baja, yang cenderung bukan padat tenaga kerja tetapi padat modal, memang sekilas tidak banyak dampaknya secara langsung terhadap pengangguran. Namun demikian, perlu disadari bahwa sektor industri tersebut adalah sektor industri dasar yang utama bagi perkembangan industri lainnya. Produk dari sektor industri dasar logam, besi dan baja ini adalah menjadi bahan dasar untuk pembangunan infrastruktur jalan, listrik, jembatan dan sebagainya termasuk bahan dasar dari pembangunan sektor industri bangunan dan perumahan. Artinya, jika sektor industri dasar logam, besi dan baja ini mengalami penurunan, maka akan berdampak luas terhadap sektor industri terkait lainnya termasuk industri perumahan, karena bahan-bahan dsar bangunan yang dari besi dan baja terus meningkat. Pembangunan sektor infrastruktur juga

menjadi sulit tumbuh dan berkembang. Dengan kata lain, menurunnya sektor industri logam, besi dan baja ini juga berdampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja atau bisa jadi menambah pengangguran.

Dampak yang lebih luas dari menurunnya sektor industri logam, besi dan baja ini yang harus diwaspadai justru terhadap pembangunan infrastruktur. Penurunan dari sektor industri logam, besi dan baja ini dapat berdampak pada menurunnya sumbangan terhadap pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur menurun, maka pembangunan fasilitas industri lainnya jelas menjadi masalah. Lambatnya pembangunan infrastruktur jelas berdampak pada sektor industri lain menjadi sulit tumbuh dan berkembang dengan baik. Artinya dampak penurunan dari sektor industri dasar logam, besi dan baja justru lebih berdampak lebih luas tidak hanya pada masalah pengangguran dan kemiskinan, namun berdampak pada lemahnya daya saing sektor industri lainnya dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah secara lebih luas.

Jika dikaitkan dengan dampak krisis ekonomi global yang pada saat ini sedang terjadi, maka fenomena deindustrialisasi menjadi semakin berat untuk dapat segera diatasi. Hal ini dapat terjadi sekalipun sektor industri tersebut dapat tumbuh dengan baik, karena sejumlah tujuan ekspor Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa juga sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga masalah tersebut justru memperkuat terjadinya deindustrialisasi di dalam negeri Indonesia. Padahal, pada saat ini penjualan dari produk-produk industri dalam negeri juga terus merosot, karena adanya serbuan besar-besaran dari produk-produk impor asal China yang terus-menerus menggerus pasar domestik Indonesia. Dampak selanjutnya, jika kualitas SDM Indonesia tidak segera ditingkatkan jelas akan menambah pengangguran semakin banyak, karena kita sadar peningkatan kualitas SDM adalah butuh proses waktu yang panjang dan serius serta berkelanjutan.

Pada tabel-4 di atas, pertumbuhan sektor industri manufaktur secara triwulanan yang relatif rendah dan bahkan negatif, menunjukkan bahwa nilai tambah terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri ini adalah rendah pula. Artinya, keberadaan industri manufaktur tersebut yang

cenderung padat tenaga kerja sudah tidak dapat diandalkan lagi sebagai penopang utama dalam penyerapan tenaga kerja (pengurangan pengangguran). Rendahnya nilai tambah sektor industri manufaktur ini yang tidak segera diatasi dengan kualitas SDM yang trampil dan berkualitas, maka berdampak semakin buruk terhadap tingkat daya saing industri yang cenderung tren memburuk.

Fenomena ini dapat diperjelas pada gambar-3 di bawah ini. Pada gambar-3 menunjukkan bahwa tren penurunan daya saing industri manufaktur nasional terekam dalam banyak laporan dan kajian perbandingan daya kompetitif internasional. *International Institute for Management Development (IMD)* dalam *World Competitiveness Report 2004*, misalnya, menempatkan Indonesia pada posisi ke-58 dari 60 negara yang diteliti. Peringkat ini turun dari posisi ke-43 pada 2000, serta posisi ke-46 pada 2001. Penurunan dan rendahnya daya saing perekonomian nasional serta sektor industri manufaktur menurut catatan IMD disebabkan setidaknya oleh 5 faktor: *Pertama*, kinerja perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga yang buruk. *Kedua*, inefisiensi kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, negara/ fiskal. *Ketiga*, banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang kurang kondusif bagi dunia usaha. *Keempat*, rendahnya produktivitas dunia usaha akibat pasar tenaga kerja yang tidak optimal, akses ke sumber keuangan, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif masih kurang menunjang. *Kelima*, masih terbatasnya infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi maupun infrastruktur dasar lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Pertumbuhan kinerja pada sektor industri manufaktur yang melemah pasca krisis 1997/1998 mengindikasikan masalah deindustrialisasi di Indonesia makin nyata. Sejak tahun 2000, sumbangan sektor industri terhadap PDB terus menurun, dan terutama pada periode tahun 2005-2010, tingkat pertumbuhan sektor industri juga lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Dampak selanjutnya, perilaku dari sektor industri tersebut sering hanya menambah jam kerja baru saja daripada merekrut tenaga kerja baru yang terutama hanya bertujuan untuk mempertahankan diri dan memperbaiki tingkat pendapat pekerja daripada di PHK. Ini artinya, tenaga kerja yang ada saja tidak punya

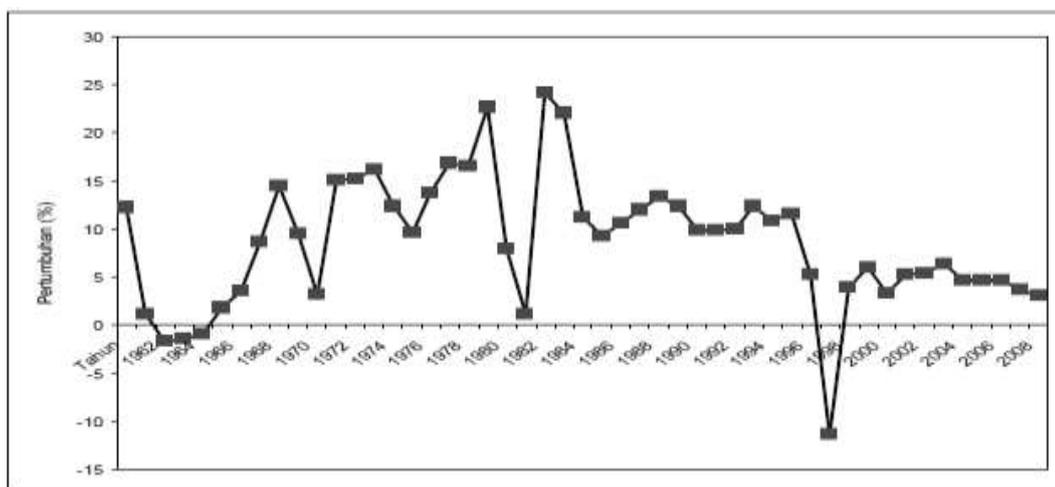
banyak pilihan apalagi menambah tenaga kerja baru yang tidak sesuai ketrampilan dan kualitas yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa, upaya menggejot pertumbuhan ekonomi dari sektor industri menjadi semakin sulit diharapkan, padahal selama ini sektor industri paling banyak menyerap tenaga kerja

selain sektor pertanian, sementara sektor jasa sekalipun pertumbuhannya bagus juga belum sepenuhnya baik. Indikasi dari fenomena inilah yang justru memperkuat *triple strak strategy* pembangunan terancam gagal.

Tabel 4. Pertumbuhan Produksi (*q-to-q*) Industri Pengolahan Besar dan Sedang Menurut Jenis Industri (persen) Tahun 2009 - 2010
2000 = 100

KBLI	Jenis Industri	Triwulan/Tahun					
		I/09	II/09	III/09	IV/09	2009	I/10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Makanan dan minuman	0,34	4,55	3,82	-3,32	9,86	0,19
16	Pengolahan tembakau	8,29	1,83	5,40	3,13	25,53	-0,55
17	Tekstil	-4,05	6,40	-0,02	-2,25	-5,49	-4,01
18	Pakaian jadi	-2,29	0,37	-0,25	-4,45	-8,86	-0,10
19	Kulit dan barang dari kulit dan alas kaki	-4,56	3,64	4,07	5,92	0,89	0,70
20	Kayu, barang-barang dari Kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman	-6,29	-2,59	3,91	4,12	-3,99	-7,64
21	Kertas dan barang dari Kertas	4,05	0,02	-0,86	0,60	1,88	-6,40
24	Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	1,81	2,14	-2,00	4,18	2,81	3,71
25	Karet dan Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	-0,23	-0,02	0,12	2,09	3,01	0,14
26	Barang Galian Bukan Logam	-2,77	4,80	3,48	5,21	-1,98	-4,07
27	Logam Dasar	2,99	3,28	2,34	-3,02	-5,49	-2,12
28	Barang-barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	1,23	0,84	3,18	-3,27	-8,06	-0,49
29	Mesin dan Perlengkapannya	5,00	0,90	6,17	1,00	-0,79	0,83
31	Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	-0,31	-1,05	3,86	-3,59	0,64	-5,17
32	Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	-8,85	1,25	4,16	1,34	-2,61	1,95
34	Kendaraan Bermotor	-16,80	4,95	8,86	5,79	-4,93	3,57
35	Alat Angkutan, selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	-1,10	2,73	9,98	0,75	4,17	2,66
36	Furnitur dan Pengolahan Lainnya	1,74	-6,21	3,62	3,36	-0,64	-2,43
Industri Pengolahan		-1,65	2,38	2,74	0,50	1,22	-1,59

Sumber: BPS, 2010



Gambar-4: Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Manufaktur Indonesia (1962-2008)

Penyebab deindustrialisasi dan solusinya

Jika ingin menyelesaikan masalah deindustrialisasi, maka terlebih dahulu harus diketahui penyebab terjadinya deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia. Secara garis besar penyebab deindustrialisasi dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu penyebab eksternal dan internal. Penyebab deindustrialisasi secara eksternal karena adanya krisis ekonomi global yang menyebabkan daya serap produk ekspor dari produk-produk industri Indonesia terutama ke Jepang, Amerika Serikat dan Eropa menjadi menurun drastis, sementara itu serbuan pangsa pasar produk-produk industri terutama dari China terus makin memperburuk pasar domestik produk industri dalam negeri Indonesia sendiri. Sedangkan, penyebab deindustrialisasi dari sisi internal adalah; terutama disebabkan pada masih rendahnya kualitas ketrampilan SDM di sektor industri, sehingga berdampak pada tetap masih rendahnya tingkat produktivitas dan selanjutnya rendahnya tingkat produktivitas juga berdampak pada daya saing industri yang tetap rendah pula. Penyebab utama kedua adalah, kebijakan pemerintah yang kurang mendukung bahkan cenderung kontradiksi terutama di tahun 2005, kebijakan kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) ternyata berdampak luas, serta kebijakan investasi yang lemah (salah). Dampak turunan dari kebijakan tersebut, mengindikasikan bahwa tetap masih rendahnya tingkat investasi di sektor riil dan rendahnya pembangunan infrastruktur yang belum memadai sehingga menjadi penyebab utama terjadinya deindustrialisasi yang semakin meluas. Penyebab internal lainnya adalah masih rendahnya daya dukung sektor kredit perbankan, lemahnya dukungan riset dari lembaga riset dan akademisi, terutama terhadap transfer teknologi tepat guna dan hak paten serta stabilitas ekonomi dan keamanan (terutama ancaman teroris terhadap investasi).

Deindustrialisasi di Uni Eropa dan AS, yang ditandai dengan menurunnya nilai tambah industri manufaktur AS terhadap PDB dari 15,3 persen di tahun 1997 menjadi hanya sebesar 11,1 persen di tahun 2009, dan turunnya nilai tambah industri manufaktur di Uni Eropa terhadap PDB yang pada tahun 1997 sebesar 21,1 persen menjadi hanya sebesar 16,4 persen di tahun 2009. Jika deindustrialisasi di kedua negara besar (AS dan Eropa)

tersebut disebabkan karena imbas dari krisis finansialnya (karena masyarakat lebih tertarik berinvestasi hanya di sektor keuangan daripada di sektor riil), serta adanya ancaman produk industri manufaktur China. Karena China beberapa tahun terakhir ini telah mampu menghasilkan produk-produk berteknologi tinggi dan bermutu tinggi dengan tingkat harga yang lebih murah. Fenomena ini ternyata berdampak terhadap deindustrialisasi di Indonesia, karena kedua negara Eropa dan AS tersebut merupakan pangsa pasar ekspor terbesar produk industri Indonesia selain Jepang. Sementara itu, produk Industri dari China, telah mempersempit peluang pasar ekspor secara internasional juga ikut memperburuk daya saing dan pangsa pasar produk industri di dalam negeri Indonesia sendiri.

Solusinya adalah harus ada kebijakan fiskal, terutama kebijakan tarif ekspor yang rendah terhadap produk kualitas ekspor dari produk Industri Indonesia dan kebijakan proteksi atau tarif impor yang tinggi terhadap produk-produk yang dapat mematikan industri dalam negeri. Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan investasi yang kondusif yang memudahkan industri baru bermunculan serta kebijakan pengembangan industri yang sudah ada baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal dan peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri. Kebijakan lain yang dimaksud ini khususnya adalah kebijakan investasi pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor industri di dalam negeri untuk mudah tumbuh dan berkembang baik dan mampu bersaing dengan produk-produk dari industri asing.

Kebijakan ekonomi yang salah yang dapat mendorong terjadinya deindustrialisasi (seperti kebijakan kenaikan TDL dan BBM) harus segera dihentikan terlebih dahulu, sehingga akan mendorong pemilik modal (PMDN maupun PMA) untuk berinvestasi di dalam negeri. Selanjutnya kebijakan yang pertama dan utama yang harus dilakukan adalah investasi pembangunan infrastruktur dalam arti luas, termasuk infrastruktur pendidikan yang mampu menciptakan kualitas SDM trampil secara berkelanjutan. Artinya, pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana transportasi dan perdagangan memang sangat diperlukan, namun pembangunan infrastruktur pendidikan juga lebih penting dan tetap harus diutamakan. Karena penggerak utama sebagai

modal pembangunan di sektor industri adalah sektor tenaga kerja (SDM berkualitas).

Karena masalah deindustrialisasi juga dapat menyebabkan sulitnya reindustrialisasi, maka harus dipikirkan bahwa reindustrialisasi (menggairahkan kembali sektor industri) bukan perkara yang gampang dan perlu solusi secara komprehensif dan aplikatif baik dari solusi mikro, meso maupun makro. Kebijakan investasi dan pemasaran serta stabilisasi ekonomi-sosial industri secara mikro dan meso (UMKMK) harus diutamakan, karena usaha industri mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK) tersebut banyak menyerap tenaga kerja, sehingga lebih cepat membantu pengurangan pengangguran dan kemiskinan secara lebih nyata.

Dampak deindustrialisasi yang paling populis adalah terkait dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja seperti yang telah banyak di jelaskan di atas dan solusinya. Sedangkan, dampak lain dari deindustrialisasi yang harus diwaspadai selain sulitnya melakukan reindustrialisasi adalah semakin berpotensi negara dan masyarakat yang sama-sama konsumtif (cirinya dari tahun ketahun neraca impor cenderung lebih besar daripada ekspor, serta bukti bahwa PDB Indonesia dari sisi pengeluaran terbesar adalah dari komponen pengeluaran konsumsi masyarakat yang mencapai rata-rata 60% lebih), dan meningkatnya ketergantungan kepada negara-negara pengekspor industri manufaktur, terutama dari China yang saat ini harus diwaspadai.

Jika penambahan penduduk Indonesia terus meningkat dan tidak segera diatasi dengan baik, maka jelas ini memerlukan tambahan banyak produk-produk yang harus dihasilkan oleh sektor industri. Padahal sektor industri sendiri sedang mengalami masalah deindustrialisasi, sementara itu, jelas bahwa setiap penambahan jumlah penduduk ini membutuhkan konsumsi pula dan bahkan meningkat. Dengan demikian, fenomena ini mengindikasikan bahwa jika kebutuhan akan barang-barang produk industri tersebut tidak dapat dipenuhi karena deindustrialisasi, maka masyarakat dan negara kita menjadi konsumtif. Solusinya dibutuhkan kebijakan pemerintah yang cerdas dan kuat serta mampu sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat.

Pertanyaanya bisakah pemerintah dan DPR Indonesia saat ini memberikan contoh tersebut. Jawabnya mungkin tidak, maka dampaknya hamper setiap kebijakan yang dilakukan adalah yang mudah ia lakukan tapi dampaknya sangat banyak merugikan rakyat dan tidak mendidik, boros dan konsumtif. Contohnya adalah kebijakan JPS atau BLT, kenaikan BBM dan TDL, kebijakan solusi suka impor, serta kenaikan gaji yang tidak produktif dan sebagainya. Inilah contoh kebijakan yang sesungguhnya salah tapi tetap dilakukan.

Asalkan ada niat, motivasi, serta komitmen kuat dan kemampuan, bagaimanapun masalah deindustrialisasi sebenarnya masih dapat ditasai atau dikurangi. Solusi termudah adalah menghilangkan atau mengurangi sebab-sebab tersebut di atas. Misalkan solusi termudah adalah menambah modal investasi di sektor industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas dan ketrampilan SDM di semua lini, dukungan kredit investasi perbankan yang murah dan mudah, serta dukungan riset dan pengembangan serta transfer teknologi dari akademik.

Selanjutnya, jika kita bicara solusi tentu bicara dengan peran, karena tidak akan ada solusi jika tidak ada peran. Peran yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu peran akademisi atau lembaga riset dan universitas, peran pemerintah dan peran pelaku bisnis atau industri itu sendiri serta peran dari pemerintah terkait termasuk lembaga perbankan atau yang dapat disingkat *Triple Helix* dari ABG (*Academic, Bussines and Government*). Peran yang diharapkan dari akademik adalah aplikasi dari hasil-hasil riset dan pengembangan (R&D) yang bermanfaat bagi industri secara nyata. Peran dari pemerintah adalah tentang kebijakan investasi pembangunan infrastruktur dan iklim investasi yang sehat serta stabilisasi ekonomi dan kemandirian serta dukungan lembaga kredit investasi dari perbankan untuk pengembangan dan pembangunan sektor industri. Peran masyarakat bisnis dalam khususnya industri terkait adalah membuat produk-produk industri yang berkualitas, murah dan terjangkau masyarakat serta bekerjasama dalam *Triple Helix* untuk melakukan promosi secara gencar pada masyarakat agar citra produk dalam negeri sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Jika deindustrialisasi dimaknai karena menurunnya sumbangan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka masalah deindustrialisasi di Indonesia setelah krisis ekonomi 1997/1998 khususnya sejak tahun 2003-2009 dapat dinyatakan sudah terjadi. Banyak penyebab terjadinya deindustrialisasi baik secara eksternal maupun internal, namun masalah internal nampak lebih pelik. Sedangkan dampak deindustrialisasi yang berat adalah terhadap penurunan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja (pengurangan pengangguran) dan kemiskinan. Karena itu, dampak deindustrialisasi di Indonesia yang terjadi pada periode 2003-2009 dapat dinyatakan sebagai ancaman kegagalan *triple track strategy* pembangunan ekonomi di era pemerintahan SBY. Solusi yang ditawarkan adalah harus ada strategi *Triple-Helix* dari (ABG) untuk membantu industri, dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketrampilan SDM melalui pendidikan dan riset, serta keseriusan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan investasi pembangunan infrastruktur dalam arti luas khususnya yang mendorong industri dan perdagangan.

Rekomendasinya adalah harus terus ditumbuhkembangkan budaya riset dan hakpaten industri, dengan memanfaatkan konsep *Triple-Helix*, serta pola koordinasi dengan kebijakan pemerintah yang mendukung hasil riset-riset tersebut serta dengan sektor industri dan bisnis yang membutuhkan hasil riset-riset tersebut. Selain itu, perlu ada kesadaran bersama semua pihak, agar lebih cinta untuk menggunakan produk dari industri dalam negeri sendiri. Karena, akhir-akhir ini kita sudah sangat rakus dalam konsumsi, namun yang kita konsumsi cenderung lebih banyak barang-barang impor, sehingga justru berdampak panjang terhadap masalah deindustrialisasi dan semakin hilangnya kemandirian dan jati diri bangsa karena ketergantungan terhadap asing semakin besar. Padahal di sisi lain, kita dikaruniai alam yang sangat kaya, tetapi kita tidak dapat memanfaatkannya, sungguh menge-nakan dan sangat ironis sekali jati diri bangsa Indonesia ini. Pertanyaan ke depan yang harus dijawab adalah apakah bangsa ini akan seperti tikus yang mati di lumbung padi karena banyak korupsi dan deindustrialisasi. Jika masalah konsumsi ini tidak

segera diatasi, bisa jadi beberapa tahun ke depan Indonesia dapat mengalami krisis pangan yang cukup memalukan.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, disarankan agar pemerintah sendiri harus segera membuat berbagai program aktivitas untuk penyelamatan deindustrialisasi ini. Program paling utama dan segera dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM trampil melalui aktivitas pendidikan dan pelatihan serta berbagai program utama pengembangan sektor industri. Program pengembangan utama industri, khususnya lebih diutamakan pada ketiga sektor industri yang paling parah dan nyaris ambruk karena terjadinya deindustrialisasi. Jika ketiga sektor industri tersebut tidak segera diatasi akan berdampak negative yang lebih luas. Ketiga sektor industri yang dimaksud yaitu: sektor industri tekstil, barang kulit dan alas kaki, sektor industri barang kayu dan hasil hutan, serta sektor industri logam dasar besi dan baja. Sedangkan berbagai program pengembangan industri yang dimaksud dapat meliputi aktivitas ekonomi, yaitu pengembangan industri baja, pengembangan, industri tekstil, industri mesin dan peralatan transportasi, industri perkapalan, industri kayu dan pengembangan lahan pangan termasuk industri makan dan minuman, baru dilanjutkan ke semua sektor industri terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faisal, 2009, *Deindustrialisasi Benar-Benar Serious!*, Artikel, <http://ekonomi.kompasiana.com>.
- Basri, Faisal, 2009, *Deindustrialisasi*, Artikel, Tempo, 30 Nov-5 Desb 2009, Hal 102-103.
- Basri, Faisal, 2010, *ASEAN-China Free Trade Area dan Deindustrialisasi*, Artikel, Kompas, <http://ekonomi.kompasiana.com>
- Dewi, Diah Ananta, 2010, *Deindustrialisasi di Indonesia 1983-2008; Analisis Pendekatan Kaldorian*, Tesis, Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor: IPB
- Kementrian Riset dan Teknologi, 2004, *Visi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025*, Lampiran Kepmen Ristek RI

- Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, 2005, Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025, Lampiran Kepem BAPENAS.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009, *Stop Deregulasi*, Artikel, Kompas, <http://ekonomi.kompasiana.com>
-, 2010, Hilirisasi Industri Agro: Dapat Mengatasi Ancaman Deindustrialisasi, Majalah Kina (karya Indonesia), Edisi 3, Jakarta: Kementerian Perindustrian.
- Pambudhi, Agung, 2007, Daya Saing Investasi Daerah Opini Dunia Usaha, Kumpulan Tulisan "*Membangun Daya Saing Industri Daerah*", Jakarta: Kementerian Perindustrian
- Pangestu, Mari E., 2004, "Tantangan Membangkitkan Daya Saing Indonesia dan Sektor Rill, *Economic Review Journal*, No. 198, Dec, 2004
- Prasetyo, P. Eko, 2006, "Model Keputusan Penentuan Lokasi Industri" *Jurnal Sinergi*, FE UPY, No. 1, Vol. 5, 2006
- Prasetyo, P. Eko, 2008, The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, *Jurnal JEJAK*, Vol. 1 No. 1 September 2008, Hal.18-31
- Prasetyo, P. Eko, 2010, *Ekonomi Industri*, Yogyakarta: Beta Offset
- Prasetyo, P. Eko, 2010, "Struktur dan Kinerja Industri Besi dan Baja Indonesia tidak Sekuat dan Sekokoh Namanya", *Jurnal JEJAK*, Vol. 3 No. 1 Maret 2010, Hal. 12-27
- , 2008, *Titik Nadir Deindustrialisasi*, Jakarta: LP3ES
- Saparini, Hendri, 2010, *Deindustrialisasi Sebagai Dampak Neoliberalisme*, Artikel Lepas, [Http://www.rimanews.com](http://www.rimanews.com), donwload, Selasa, 7 Desember 2010.